

## TAJUK RENCANA

### Politik Identitas Pemecah Bangsa

**TAHUN** politik masih 2 tahun lagi. Namun suasana dukung mendukung Capres sudah mulai sekarang. Biasanya dalam tahun politik, dukung mendukung ini menjadi pemicu perpecahan. Terjadi pro dan kontra, sehingga menghambat persatuan bangsa. Karena itu Wakil Presiden KH Mak'ruf Amin meminta agar masyarakat berperan menjaga bangsa (KR 25/10).

Tentu yang dimaksudkan Wapres, adalah seluruh masyarakat. Pemilihan presiden adalah puncak segala perhelatan di tahun politik tersebut. Apalagi tahun 2024 adalah berakhirnya masa jabatan Presiden Jokowi setelah dua kali periode. Artinya bakal ada presiden baru. Siapa yang bakal jadi orang nomor satu di Indonesia tersebut, saat ini hampir seluruh partai sedang menimbang-nimbang, mencari tokoh dan pasangan yang layak. Nuansanya sudah sangat terasa, dengan makin gencarnya seluruh partai politik mempersiapkan diri. Para kader partai sudah mulai riuh, meski dengan narasi tidak akan nyapres atau 'malu-malu'. Ada yang ngotot mencalonkan diri, meski elektabilitas di masyarakat sangat rendah.

Perbedaan aspirasi politik itu boleh saja, namun bukan berarti harus bermusuhan. Perhelatan politik besar, karena diselenggarakan pemilu serentak. Pemilu secara nasional untuk pemilihan presiden, DPR, DPD, DPRD, dan juga pilkada serentak pada 2024.

Saat ini memang baru Partai NasDem yang terang-terangan mencalonkan Anies Baswedan sebagai capres. Namun nuansa perpecahan, polarisasi sudah sangat terasakan. Berbagai teknik, strategi dan metode digunakan partai politik untuk mengikuti, berkompetisi dan meraih suara sebanyak-banyaknya dalam pesta demokrasi lima tahun sekali tersebut. Namun sayangnya ketidaksukaan diwujudkan melalui hoaks di media sosial.

Biasanya yang menjadi masalah adalah nuansa politik identitas. Politik inilah yang memecah belah persatuan dan kesatuan, karena

orang atau kelompok yang pilihannya tidak sama dengan kelompoknya dianggap musuh. Isu politik identitas selalu muncul saat-saat seperti itu. Kebenaran dikapling-kapling seolah adalah miliknya. Yang benar adalah diri/kelompoknya. Orang lain di luar kelompoknya adalah salah.

Apalagi kini ada media sosial yang bisa menjadi salah satu alat yang masif sebagai alat polarisasi tersebut. Dalam catatan, Pemilu 2019 lalu Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berhasil menjangkit 771 konten hoaks atau berita palsu. Dari 771 konten hoaks tersebut mayoritas adalah berita palsu yang berkaitan dengan politik jelang Pilpres 2019.

Selain konten hoaks politik, hoaks isu kesehatan berada diperingkat kedua, isu pemerintahan 119 konten hoaks, kemudian hoaks berisikan fitnah terhadap individu tertentu 110 konten. Semua konten, baik tulisan maupun foto, diberi penanda khusus oleh Kominfo dan diumumkan sebagai hoaks agar tak lagi disebarkan masyarakat. Namun, bukannya mereda. Tetap ada kecenderungan pengguna internet untuk mengumbar hoaks, dan trennya terus meningkat menjelang Pemilu.

Maka langkah indahnya, jika partai politik dan siapapun yang akan ikut berlaga dalam Pemilu 2024, agar saling menjaga narasi kerukunan bangsa. Menjadikan kampanye sebagai ajang yang sehat tidak saling melecehkan calon lain. Bertandil dengan fair dan akal sehat. Parpol punya peran strategis dalam perhelatan ini. Jangan mengumbar statement yang bisa menyulut permusuhan dan perpecahan.

Pemilu serentak ini akan menjadi tantangan, menjadi ujian yang sesungguhnya bagi Bangsa Indonesia dalam menjalankan demokrasi. Bukan hanya sekadar menjalankan mandat reformasi. Tapi kita harus dapat menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara dengan demokrasi yang matang. Jangan sampai mengganggu kerukunan bangsa. (\*\*\*)-d

## Setelah WTP, Lalu ke Mana?

### Wisnu Hermawan

Ketiga problem tersebut sebenarnya memiliki kaitan satu sama lain. Ketika perekonomian DIY yang disokong sektor pariwisata, pendidikan, & budaya; berjalan pesat, ternyata memberikan fenomena ketidakmerataan. Ketimpangan wilayah maupun ketimpangan pendapatan me-



KR-JOKO SANTOSO

Sebagai catatan, opini WTP merupakan opini tertinggi dalam laporan keuangan pemerintah yang menunjukkan pencatatan transaksi pemerintah daerah sudah memenuhi kaidah akuntansi pemerintahan. Hal ini menunjukkan tatakelola akuntabilitas pemerintah daerah sudah menunjukkan tingkat pengelolaan yang cukup prima. Sebagaimana capaian nilai AA pada akuntabilitas kinerja selama beberapa tahun yang belum tertandingi daerah manapun.

### Beberapa Persoalan

Namun, apabila ditelaah secara kritis, capaian WTP selama lebih dari 10 tahun berturut-turut itu, merupakan kinerja pengelolaan aspek keuangan dalam perspektif tatakelola kegiatan. Artinya, kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah, sudah memenuhi aspek-aspek kelayakan administratif yang dapat dipertanggungjawabkan. Ketika kinerja kegiatan dikaitkan dengan aspek kinerja yang lebih tinggi tingkatannya, maka masih terdapat beberapa persoalan yang harus diantisipasi.

Kegiatan yang dilaksanakan secara baik, seharusnya mendukung capaian outcome hingga impact terhadap kinerja pembangunan daerah. Data BPS DIY, selama dua periode RPJMD atau 10 tahun, sejak 2012 - 2022, menunjukkan sekurangnya terdapat tiga problem pemerintah daerah yang belum terpecahkan, yakni: kemiskinan, ketimpangan, & kualitas lingkungan. Ketiganya seharusnya bisa diantisipasi melalui intervensi program kegiatan yang berkualitas.

nunjukkan bahwasanya ekonomi pada wilayah perkotaan lebih tumbuh karena fasilitas sarpras yang sangat memadai & distribusi pendapatan pelaku ekonomi yang tidak merata, meskipun dominasi pelaku ekonomi, sebagian besar dijalankan usaha mikro-kecil. Skema ekonomi pasar yang timpang inilah yang menyebabkan masih tingginya tingkat kemiskinan, pada wilayah perdesaan.

Beberapa problema itu harus dijawab karena menjadi indikator kinerja utama pemerintah daerah. Apalagi tahun 2022 ini adalah momen yang tepat untuk melakukan penataan kinerja, bertepatan dengan penyusunan RPJMD baru untuk periode lima tahun mendatang. Pohon kinerja atau cascading program kegiatan, perlu ditata ulang dan direview capaiannya secara lebih terukur serta sistematis.

### Kemiskinan

Pencapaian kinerja pada level Pemda hingga turun pada level setda/asisten hingga kepala OPD setidaknya bisa dikaitkan secara tegas tidak hanya pada satu tanggungjawab saja. Melainkan, pencapaian kinerja setidaknya bisa didukung oleh support dari beberapa pihak. Sebut saja, pengentasan kemiskinan & atau ketimpangan, seharusnya kontribusi capaiannya bisa menjadi koordinasi lebih dari satu OPD. Kemiskinan tidak selalu menjadi tanggungjawab Dinsos atau Bappeda saja, melainkan juga sejumlah OPD dalam bidang perekonomian.

Tentunya, *logical-framework* terkait kinerja dan indikatornya harus kuat pada aspek analisa & komitmen yang dibangun. Komitmen ini memerlukan dirigen yang kuat sejak aspek perencanaan, melalui dukungan data yang memadai. Semestinya lebih kreatif untuk menyusun pohon kinerja secara lebih fleksibel yang didukung elemen sejak dari pemerintah kabupaten hingga pemerintah desa.

Mengingat komitmen Gubernur DIY untuk merevitalisasi desa sangat jelas. Apalagi dukungan dana yang semestinya bisa mendriver pola & arah pembangunan secara lebih fokus & cermat dengan isu-isu terkini. Jangan sampai, momentum capaian WTP yang tertinggi diraih itu menjadi ritual rutin, tanpa makna & tanpa arah. □ - d

\*) **Wisnu Hermawan**, *Kabid Layanan Kewirausahaan KUKM Dinas Koperasi UKM DIY*

### Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : [opini-kr@gmail.com](mailto:opini-kr@gmail.com) dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

## Memaknai Kemenangan Perempuan dalam Pemilihan Lurah

### Sunaji Zamroni

rah Kalurahan Kebonagung Imogiri periode 2017-2023. Sedangkan calon lurah Ernawati merupakan lurah antarwaktu Kalurahan Tlirenggo Bantul periode 2021-2022. Sosok Ernawati menjadi debutan pemimpin Kalurahan Tlirenggo yang notabene semi perkotaan (*suburban*) sejak Januari 2021. Dia menjadi lurah antarwaktu, kurang dari 2 tahun. Namun singkatnya waktu memimpin telah berhasil dikapitalisasi menjadi modal politik dan modal sosial. Tidak sembarangan kemenangan yang diraihinya, lebih dari 60%.

Pemilihan lurah Kalurahan Tlirenggo diseliluti drama unik. Sepasang suami istri menjadi calon lurah di kalurahan ini. Calon lurah Ernawati harus bertarung melawan suaminya (calon lurah Budi). Berdasarkan informasi yang terhimpun, sang suami terpaksa mengajukan diri sebagai calon lurah pada hari terakhir pendaftaran, untuk menghindari calon tunggal pada gelaran pemilihan lurah di Kalurahan Tlirenggo. Perkiraannya meleset. Pada "menit terakhir", calon lurah Ayon mendaftarkan diri. Calon lurah suami istri melawan calon lurah lainnya. Bisa jadi drama unik ini menjadi *gimmick* politik elektoral kalurahan yang musti tergelar.

### Jangan Meremehkan

Falsafah Jawa *jalma tan kena kinira* menarik untuk memaknai kemenangan Ernawati ini. Pesan moral falsafah tadi mengingatkan, bahwa tidak boleh kita menghakimi kehidupan

seseorang. Mentang-mentang perempuan, misalnya, dianggap tak pantas memimpin desa. Pesan moral ini sejalan dengan prinsip dasar demokrasi. Setiap individu memiliki hak untuk memilih dan dipilih.

Sosok Ernawati membuktikan pesan moral di atas. Dirinya memang perempuan, baru menjabat lurah kurang dari 2 tahun. Bisa jadi belum cakap dan masih sedikit karya kepemimpinannya. Namun dia menghadirkan kepemimpinan yang sederhana, mudah diterima, dan tidak merepotkan masyarakat. Bisa jadi dia memimpin dengan cara melayani siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Pemimpin yang melayani, mungkin penyebab Ernawati diterima memilihnya. Bukan politik juga. Tetapi politik kepemimpinan yang melayani. □ - d

\*) **Sunaji Zamroni**, *Pendiri Alterasi Indonesia, Dewan Nasional FITRA, Peneliti di UNU Yogyakarta, dan Mantan Komisioner KPU Kota Yogyakarta.*

## Pojok KR

Wapres: Pemilu beda pilihan, jangan rusak persatuan.

--Para kontestan jangan mengumbar statement yang menyestatkan.

\*\*\*

BPOM pidanakan dua industri farmasi.

--Yang lebih penting, selamatkan kesehatan anak-anak.

\*\*\*

Kapolri: Polisi jangan suka pamer-pamer.

-- Supaya tidak dibanding-bandingkan.

*Berabe*

## PIKIRAN PEMBACA

Naskah bisa dikirim Email atau WA

[pikiranpembaca@gmail.com](mailto:pikiranpembaca@gmail.com) 0895-6394-11000

dilampiri fotocopy/Scan KTP

atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat

Jalan Margo Utomo 40 - 42 Yogyakarta 55323.

Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks.

Isi menjadi tanggungjawab penulis.

### Parpol Baru, Jangan Asal Comot Nama

**BEBERAPA** hari lalu, saya ketamuan tamu dari KPU dan Bawaslu. Mereka klarifikasi, mengenai keanggotaan parpol yang baru. Saya kaget, ternyata nama saya masuk didaftar sebagai anggota parpol tersebut. Saya kaget, karena kenal saja tidak. Bahkan tidak tahu dan tidak pernah berhubungan dengan partai politik yang baru.

Apalagi posisi sebagai dosen, tentu saya ingin independent. Selain saya terus terang memang belum tertarik untuk kegiatan partai politik.

Saya adalah salah satu nama

yang terjaring acak dari KPU, yang sekarang sedang dalam proses klarifikasi parpol baru dengan system *door to door*. Kasus semacam ini, ternyata banyak dialami oleh teman-teman saya. Petugas KPU mendapatkan nama dari partai baru untuk memenuhi kuota.

Saya berharap partai baru yang akan ikut pemilu, jangan asal ambil nama. Tetapi herannya, mengapa nomor KTP nya bisa persis termasuk alamat rumah. □ - d

**Ir Gunawan Arsana**,  
*Mrican, Caturtunggal, Depok Sleman.*

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.  
Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi ( 2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yurija Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSos.

## Kedaulatan Rakyat

**Pemimpin Umum:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussabada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Dra Hj Fadmi Sustuti, Dra Prabadari, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Atfiati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Eddy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafiis:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyanti.

**Pemimpin Perusahaan:** Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

**Manajer Iklan:** Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: [iklan@kr.co.id](mailto:iklan@kr.co.id), [iklankrk23@yahoo.com](mailto:iklankrk23@yahoo.com), [iklankrk13@gmail.com](mailto:iklankrk13@gmail.com).

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display... Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga... Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris)... Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm, maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm... Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi DI s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00 /mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

**Alamat Kantor Utama dan Redaksi:** Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)